



ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT BASED ON ISPO CERTIFICATION PRINCIPLES IN PALM OIL COMPANIES IN INDONESIA IN 2021

ANALISIS IMPLEMENTASI SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT BERDASARKAN PRINSIP SERTIFIKASI ISPO PADA PERUSAHAAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA PADA TAHUN 2021

Nativito Kiva Hartanto

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Parahyangan
Bandung

E-mail: hartantokiva@gmail.com

ARTICLE INFO

Correspondent

Nativito Kiva Hartanto
hartantokiva@gmail.com

Key words:

oil palm, Sustainable Supply Chain Management (SSCM), ISPO

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 341 - 361

ABSTRACT

Oil palm is one of the vegetable oil-producing plantation crops which is also a superior plantation commodity that has a strategic role in Indonesia's economic development. The establishment of oil palm plantations in Indonesia is considered not to implement sustainable development goals because it will damage the environment. Consumers give demands to companies to produce products with production processes that maintain sustainable commitments. Sustainable Supply Chain Management (SSCM) is the management of the flow of materials, information and capital which is a collaboration between companies along the supply chain by integrating goals that cover the three dimensions of sustainable development namely economic, environmental and social which are elaborated from the demands of customers and stakeholders. The Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) certification system is a mandatory prerequisite set by the government for oil palm plantations to improve the governance of more sustainable palm oil.

Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Nativito Kiva Hartanto <i>hartantokiva@gmail.com</i> Kata kunci: kelapa sawit, Sustainable Supply Chain Management (SSCM), Sertifikasi ISPO Website: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER Hal: 341 - 361	Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan penghasil minyak nabati yang juga merupakan komoditas perkebunan unggulan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pendirian lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dinilai tidak mengimplementasikan tujuan pembangunan keberlanjutan karena akan merusak lingkungan. Konsumen memberikan tuntutan kepada perusahaan untuk menghasilkan produk dengan proses produksi yang menjaga komitmen berkelanjutan. <i>Sustainable Supply Chain Management (SSCM)</i> adalah manajemen aliran material, informasi dan modal yang merupakan kerjasama antar perusahaan sepanjang rantai pasok dengan mengintegrasikan tujuan-tujuan yang mencakup ketiga dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dijabarkan dari tuntutan-tuntutan pelanggan dan pemangku kepentingan. Sistem sertifikasi Indonesian <i>Sustainable Palm Oil (ISPO)</i> merupakan prasyarat wajib yang ditetapkan pemerintah untuk perkebunan kelapa sawit untuk memperbaiki tata kelola sawit yang lebih berkelanjutan. <i>Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.</i>

PENDAHULUAN

Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan unggulan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Lahan perkebunan kelapa sawit tersebar hampir di seluruh pulau Indonesia seperti di Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Papua, Maluku, dan di beberapa daerah lainnya. Tanaman kelapa sawit dapat diproses dan menghasilkan beragam produk seperti minyak goreng, margarin, sabun, bahan kosmetik, bahan obat-obatan, bahan bakar alternatif (*biodiesel*).

Permintaan minyak kelapa sawit dalam pasar minyak nabati dunia selalu meningkat. Dengan banyaknya permintaan minyak kelapa sawit, maka menyebabkan banyak pendirian lahan perkebunan kelapa sawit. Lahan perkebunan kelapa sawit membutuhkan lahan yang sangat luas sehingga lahan hutan akan dialihfungsikan. Deforestasi adalah kondisi luas hutan yang mengalami penurunan yang disebabkan oleh konversi lahan untuk infrastruktur, permukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan (Addinul Yakin, 2017). Deforestasi di Indonesia menimbulkan dampak yang sangat serius baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional, adanya kebakaran hutan yang tidak terkendali, penebangan yang merusak, membuka lahan yang dijadikan perkebunan, pengerukan bahan bakar, dan pembangunan wilayah transmigrasi yang berdampak pada sosial ekonomi bagi masyarakat dengan kehidupannya yang sangat bergantung dengan hasil alam atau hutan, dan dapat

menyebabkan timbulnya kerugian yang besar yakni bagi seluruh masyarakat maupun negara (*Directorate of Technical Education, 2017*).

Membuka lahan perkebunan dengan cara membakar hutan menjadi pilihan favorit bagi pengusaha kelapa sawit. Hal ini dikarenakan biaya yang lebih murah dan proses yang lebih singkat. Biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit apabila memilih untuk membakar hutan daripada menebang pohon di hutan. Hutan yang biasa dipakai untuk perkebunan kelapa sawit merupakan lahan gambut, sehingga akan sulit apabila pengusaha ingin membawa traktor ke lapangan. Dengan alasan tersebut maka pengusaha memilih menggunakan cara membakar hutan dalam membuka lahan perkebunan. Namun dalam pembakaran hutan ini akan menghasilkan residu berupa kabut asap yang berbahaya bagi makhluk hidup.

Kabut asap yang berbahaya bagi makhluk hidup tersebut dapat terbawa hingga ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Maka fenomena ini sudah menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia karena telah merugikan negara-negara tetangga. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menerbitkan regulasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 11 Tahun 2015 terkait *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*. Sistem sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* merupakan prasyarat wajib yang ditetapkan pemerintah untuk perkebunan kelapa sawit untuk memperbaiki tata kelola sawit yang lebih berkelanjutan. ISPO memiliki tujuan untuk memastikan bahwa prinsip keberlanjutan yang diatur dalam regulasi/kebijakan terkait dapat diterapkan, mendukung pencapaian komitmen iklim Indonesia, serta meningkatkan daya saing kelapa sawit Indonesia baik di pasar domestik maupun pasar internasional. Sertifikasi ISPO mewajibkan seluruh tipe usaha kelapa sawit yaitu Perkebunan Besar Negara, Perkebunan Besar Swasta dan Perkebunan Rakyat Indonesia sebagai jaminan bahwa praktik produksi yang dilakukan telah mengikuti prinsip dan kaidah keberlanjutan.

Perusahaan juga wajib memikirkan dampak sosial terhadap konsumen, tenaga kerja, masyarakat sekitar, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Seiring berjalannya waktu teori *Supply chain management (SCM)* perlu dikaitkan dengan teori keberlanjutan sehingga memunculkan teori *Sustainable Supply Chain Management (SSCM)*. *Sustainable Supply Chain Management (SSCM)* merupakan penggabungan dari *Supply Chain Management (SCM)* dengan konsep keberlanjutan yang merupakan tuntutan dari seluruh pemangku kepentingan. *Sustainable Supply Chain Management (SSCM)* merupakan pengembangan dari *Supply chain management (SCM)*, yang dalam konseptual dan operasionalnya terdapat interrelasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Seuring & Muller 2008; Gerrits 2020).

Kementerian Pertanian telah menerbitkan regulasi pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan atau *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* Permentan No 11 tahun 2015. Permentan No 11/2015 tentang ISPO merupakan regulasi yang wajib diterapkan oleh kepada perusahaan kelapa sawit dalam upaya memelihara lingkungan, meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial, dan penegakan peraturan perundangan Indonesia di bidang perkelapa sawitan. Penyusunan sistem sertifikasi ISPO mengacu/didasarkan pada 139 peraturan mulai Undang-undang sampai dengan peraturan Dirjen berbagai instansi pemerintah. Sistem sertifikasi ISPO adalah serangkaian persyaratan yang terdiri dari 7 (tujuh) prinsip, 34 (tiga puluh empat) kriteria dan 141 (seratus empat puluh satu) indikator yang mencakup isu hukum,

ekonomi, lingkungan dan sosial, sebagaimana tertuang dalam Permentan No 11/2015, untuk perusahaan kelapa sawit yang terintegrasi kebun dan pengolahan.

Melalui penelitian ini, perusahaan yang bergerak di industri kelapa sawit dapat mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan dari pendirian lahan perkebunan kelapa sawit. Perusahaan dapat menyusun strategi yang tepat sasaran dalam mengimplementasikan *Sustainable Supply Chain Management* di seluruh proses operasionalnya. Selain itu, penelitian juga memberikan wawasan kepada seluruh pembaca untuk mengetahui kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh adanya lahan perkebunan kelapa sawit di masa kini. Pembaca juga dapat mengetahui implementasi *Sustainable Supply Chain Management* yang telah dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kepatuhan atas ketujuh prinsip sertifikasi ISPO yang sudah dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian Analisis Implementasi *Sustainable Supply Chain Management* Berdasarkan Prinsip Sertifikasi ISPO pada Perusahaan Kelapa Sawit di Indonesia pada Tahun 2021 menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data sekunder. Data sekunder ini didapatkan dari laporan-laporan perusahaan terkait seperti *sustainability report* dan *annual report*. Di dalam laporan *sustainability report* dan *annual report* perusahaan mengandung informasi terkait penerapan *Sustainable Supply Chain* berdasarkan prinsip Sertifikasi ISPO yang dilakukan oleh perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *literature review*. Peneliti mengumpulkan data dan informasi berdasarkan dokumen-dokumen dan literatur-literatur dari masing-masing perusahaan terpilih. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Dalam penelitian ini, teknik analisis isi digunakan dalam menganalisis pengungkapan informasi implementasi *Sustainable Supply Chain Management* (SSCM) yang tercantum dalam *Sustainability Report* dan *Annual Report*.

Penelitian ini melibatkan perusahaan industri perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia. Perusahaan industri perkebunan kelapa sawit yang terpilih sebagai subjek penelitian adalah seluruh perusahaan yang bergerak di industri perkebunan kelapa sawit dan mengungkapkan Laporan Keberlanjutan tahun 2021 yang dapat diakses oleh publik. Perusahaan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang terpilih sebagai subjek penelitian yaitu PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), PT Eagle High Plantation Tbk (BWPT), PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG), PT FAP Agri Tbk (FAPA), PT Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA), PT PP London Sumatera Indonesia Tbk (LSIP), PT Mahkota Group Tbk (MGRO), PT Palma Serasih Tbk (PSGO), PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG).

Objek dari penelitian Analisis Implementasi *Sustainable Supply Chain Management* Berdasarkan Prinsip Sertifikasi ISPO pada Perusahaan Kelapa Sawit di Indonesia pada Tahun 2021 adalah implementasi *Sustainable Supply Chain Management* (SSCM). Peneliti akan melakukan penelitian terhadap bentuk implementasi *Sustainable Supply Chain Management* (SSCM) berdasarkan prinsip Sertifikasi ISPO yang telah diterapkan oleh 10 perusahaan industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang

telah mengungkapkan Laporan Keberlanjutan 2021 dan dapat diakses oleh publik. Implementasi *Sustainable Supply Chain Management (SSCM)* oleh perusahaan industri perkebunan kelapa sawit terkait selama 2021 akan dicocokkan dengan kesesuaian dari prinsip Sertifikasi ISPO.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Perpres Nomor 44 Tahun 2020 Bab III Pasal 4, dilakukannya sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia / ISPO bertujuan untuk menjamin Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia yang berkelanjutan. Penyelenggaraan sistem Sertifikasi ISPO bertujuan untuk memastikan dan meningkatkan pengelolaan serta pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit sesuai prinsip kriteria ISPO, meningkatkan keberterimaan dan daya saing Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional, dan meningkatkan upaya percepatan penurunan emisi gas rumah kaca. Pelaksanaan ISPO menerapkan tujuh prinsip yang meliputi Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Keanekaragaman Hayati, Tanggung Jawab Ketenagakerjaan, Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Penerapan Transparansi, Peningkatan Usaha secara Berkelanjutan.

A. *Sustainable Supply Chain Management* pada PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI)

1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Perseroan telah memiliki sistem pencegahan kebakaran lahan yang mengacu kepada Peraturan Perundangan (Peraturan Menteri Pertanian/ Permentan No. 5/2018 tentang Pembukaan dan/ atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar) dan telah diimplementasikan di seluruh anak perusahaan, seperti dapat dilihat di sini. Untuk memantau pelaksanaan prosedur tanggap darurat di seluruh anak perusahaan, Perseroan melakukan evaluasi internal maupun eksternal secara periodik setiap tahun.

2. Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik

Untuk dapat mematuhi aspek *Good Corporate Governance (GCG)* dan pelaksanaan kegiatan usaha secara etis dan profesional, Perseroan memiliki pedoman Kode Etik yang memberi aturan dan arahan bagi tiap-tiap fungsi organisasi dalam berpikir dan bertindak. Aspek-aspek yang diatur dalam pedoman Kode Etik Perseroan adalah (1) Nilai-nilai dan Prinsip-prinsip Dasar, (2) Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja, dan (3) Peran Sekretaris Perusahaan, Audit, dan Manajemen Risiko. Semua pedoman disusun dalam Bahasa Indonesia yang dimengerti oleh setiap karyawan.

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Keanekaragaman Hayati

Perseroan telah mengidentifikasi sejumlah spesies dilindungi (berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018) serta spesies yang berada dalam kategori rentan sampai dengan terancam punah yang masuk ke dalam Daftar Merah *IUCN (International Union for Conservation of Nature)* dan *Convention on International Trade of Endangered Species (CITES)*. Teridentifikasi lebih dari 500 spesies flora dan 580 spesies fauna berinteraksi dari satu tipe habitat dengan tipe habitat yang lain di lansekap perkebunan kelapa sawit.

4. **Tanggung Jawab Ketenagakerjaan**

Upaya Perseroan dalam menerapkan kebijakan LK3 dilakukan melalui berbagai program di seluruh anak perusahaan yang berfokus pada peningkatan terciptanya budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi seluruh pekerja di semua level dan pihak-pihak lain yang terkait.

5. **Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Program pengembangan ekonomi difokuskan pada masyarakat yang berada di kawasan ring satu Perseroan serta mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui berbagai pembinaan dan pengembangan sumber ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi di ring satu Perseroan yang dilakukan dengan berbagai skema pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut telah memberikan dampak kepada lebih dari 300 desa sesuai dengan kebutuhan wilayah dan kekhasan sumber daya alam berupa program-program bersifat spesifik lokasi.³

6. **Penerapan Transparansi**

Perseroan memastikan 100% ketelusuran sumber pasokan minyak sawit dan minyak inti sawit yang telah dicapai sejak tahun 2018 di seluruh refinery dan trading yakni Kreasi Jaya Adhikarya (KJA), Tanjung Bina Lestari (TBL), Tanjung Sarana Lestari (TSL).

7. **Peningkatan Usaha secara Berkelanjutan.**

Perseroan telah menyelesaikan rencana aksi untuk lima tahun (2021-2025) yang dapat dilihat di sini, sebagai panduan untuk mencapai target penerapan keberlanjutan dan dampak positif pada ekosistem yang lebih luas. Rencana aksi lima tahun ini merupakan kelanjutan dari rencana aksi sebelumnya untuk meningkatkan praktek keberlanjutan dengan mempertimbangkan kesulitan dan tantangan sebelumnya, serta isu-isu terkini dan masa depan yaitu penurunan risiko dampak perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca serta tetap konsisten pada komitmen Perseroan seperti tertuang dalam Kebijakan Keberlanjutan.

B. *Sustainable Supply Chain Management* pada PT Eagle High Plantation Tbk (BWPT)

1. **Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

Perseroan berpedoman pada kebijakan Sustainability, Peraturan Perusahaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan pengelolaan SDM, pengelolaan sosial di internal maupun eksternal, dan pengelolaan K3.

2. **Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik**

Sebagai salah satu anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Perseroan berkomitmen untuk menerapkan praktik terbaik kelapa sawit yang dijalankan tanpa membakar.

3. **Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Keanekaragaman Hayati**

Perseroan dan seluruh pemasok dalam pengendalian hama berupaya untuk menggunakan metode alamiah seperti mengatasi hama tikus dengan menggunakan burung hantu (*Barn owl*) dan melepaskan lalat (*Gall fly*) yang bersarang di gulma. Penggunaan metode alamiah dalam pengendalian hama

merupakan wujud komitmen Perseroan dan seluruh pemasok untuk mengurangi bahan kimia.

4. Tanggung Jawab Ketenagakerjaan

Perseroan berkomitmen untuk mempromosikan keberagaman tenaga kerja dan mematuhi kerangka standar minimum kerja dan tidak mengizinkan praktik kerja paksa, buruh migran, dan terlibat dalam perdagangan orang. Demikian pula tidak ada pekerja di bawah umur yang ditetapkan minimum kerja, yaitu 18 tahun.

5. Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Perseroan terus berupaya untuk membangun hubungan yang baik dengan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Sehubungan dengan masih merebaknya pandemi *COVID-19*, kegiatan di luar rumah masih dibatasi. Oleh karenanya, program CSR perusahaan lebih banyak dilakukan dalam pembinaan kesehatan dan peningkatan infrastruktur masyarakat.

6. Penerapan Transparansi

Sampai dengan tahun 2021, EHP telah memperoleh 6 sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)* dan 1 *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*. Diharapkan pada tahun 2026, EHP berhasil menerapkan sertifikasi ISPO dan RSPO di seluruh lokasi operasi grup. Selain itu, EHP berencana untuk mendaftarkan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Suka Damai PT Suryabumi Tunggal Perkasa dalam program Pembangunan Bersih Mekanisme (CDM).

7. Peningkatan Usaha secara Berkelanjutan.

Perseroan berkomitmen memberikan layanan, mutu, dan produk yang setara kepada pelanggan. Oleh sebab itu, Perseroan melakukan proses evaluasi terhadap seluruh (100%) proses produksi yang memerhatikan keamanan dan kesehatan pelanggan. Untuk menjamin keamanan dan kualitas produk, Perseroan maupun anak perusahaan juga berupaya untuk mendapatkan sertifikasi ISPO & RSPO.

C. Sustainable Supply Chain Management pada PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG)

1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Perseroan mengelola lingkungan dengan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah, di antaranya terkait PROPER yang merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari kesertaan PROPER tahun 2021, Perseroan memastikan tidak ada pabrik kelapa sawit (PKS) yang mendapatkan PROPER Merah.

2. Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik

DSNG memiliki komitmen, mengedepankan bisnis yang bersih dan bertanggung jawab sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Guna mendukung komitmen tersebut, Komitmen diwujudkan dalam *bentuk Code of Corporate Governance DSNG 2014, Board of Director Manual DSNG 2013 dan Code of Conduct DSNG 2013* bagi Dewan Komisaris dan Direksi, serta *Code of Conduct DSNG 2013* dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) bagi karyawan.

3. **Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Keanekaragaman Hayati**

Perusahaan secara tegas melarang segala bentuk pembakaran untuk pembukaan lahan. Perseroan tetap melakukan mitigasi terhadap adanya risiko kebakaran dengan menerapkan praktik konservasi tanah dan air yang berkelanjutan, di dalam wilayahnya yang masih terdapat risiko kebakaran dari pembakaran terbuka, di luar wilayah Perseroan, seperti adanya pembakaran terbuka dengan perladangan berpindah.

4. **Tanggung Jawab Ketenagakerjaan**

DSNG memiliki ketentuan internal mengenai imbal jasa pekerjaan kepada karyawan berupa gaji dan tunjangan. Perseroan tidak membedakan pemberian imbal jasa pekerjaan terhadap karyawan laki-laki dan perempuan. Besaran gaji atau imbal jasa pekerjaan masing-masing karyawan baik dikantor pusat maupun entitas anak telah sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan mengikuti status kepegawaian, tingkat jabatan, dan masa kerja.

5. **Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pelibatan masyarakat di wilayah terdampak dilaksanakan melalui pendekatan partisipasi dan konsultasi. Beberapa kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat terutama anak-anak, ibu hamil dan lanjut usia, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin.

6. **Penerapan Transparansi**

Sejalan dengan komitmen NDPE Perusahaan, Perusahaan membantu pemasoknya dalam rantai pasokan minyak sawit untuk mencapai kepatuhan dengan mengadopsi praktik berkelanjutan, terutama petani kecil, yang memiliki sumber daya terbatas. Rencana implementasi NDPE Minyak Sawit Perusahaan bertujuan untuk memastikan bahwa rantai pasokan minyak sawit Perusahaan 100% dapat dilacak dan sesuai dengan kebijakan NDPE Perusahaan pada akhir tahun 2025.

7. **Peningkatan Usaha secara Berkelanjutan.**

Perseroan membangun budaya perbaikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*) melalui *DSN Award – Quality Control Circle (QCC) Convention* yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Budaya perbaikan secara berkelanjutan ini mencakup bidang-bidang operasional di kebun, PKS, pabrik di industri perkebunan serta unit pendukung (*supporting*).

D. **Sustainable Supply Chain Management pada PT FAP Agri Tbk (FAPA)**

1. **Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

FAP Agri berkomitmen dalam Sistem Sertifikasi Minyak Sawit Indonesia yang Berkelanjutan (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ ISPO*) yang menjadi mandatori bagi seluruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia. ISPO merupakan kebijakan yang langsung mendapat perhatian khusus dari Presiden RI melalui Peraturan Presiden No 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, untuk menjamin bahwa minyak sawit diproduksi secara berkelanjutan dan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit di tingkat internasional yang diatur

kemudian ke dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

2. Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik

Sebagai perusahaan perkebunan yang mengandalkan SDA dalam pengelolaannya, FAP Agri menyadari bahwa setiap aktivitas Perusahaan dapat berdampak langsung kepada lingkungan. Kebakaran hutan berpotensi menjadi kejadian yang rutin dan selalu menjadi risiko konstan yang terjadi di operasi perkebunan ataupun di area sekitarnya.

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Keanekaragaman Hayati

Komitmen dan tujuan yang terkait dengan keanekaragaman hayati dalam Kebijakan Keberlanjutan FAP Agri adalah menerapkan perlindungan terhadap area NKT dan SKT serta mempertahankan kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar (*Zero Burning Policy*).

4. Tanggung Jawab Ketenagakerjaan

Dalam mencegah dan menekan tingkat kecelakaan kerja, FAP AGRI mengidentifikasi bahaya terkait pekerjaan, menilai risiko, menerapkan kontrol untuk menghilangkan bahaya dan meminimalkan risiko melalui teknik *Hazard Identification Risk Assessment and Determining Control* (HIRADC), lalu dilakukan Evaluasi dan Pengendalian dengan 5 (lima) pendekatan yaitu Eliminasi, Substitusi, Rekayasa Teknik, Administrasi, dan APD.

5. Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Program-program pemberdayaan ekonomi yang diluncurkan oleh perusahaan selalu berangkat dari kebutuhan, tepat sasaran, dan juga harus berkelanjutan. Saat ini terdapat kurang lebih 49 desa yang berinteraksi langsung dengan Perusahaan diseluruh konsesinya, dan memberikan dampak kepada lebih dari 15 ribu orang masyarakat.

6. Penerapan Transparansi

Seluruh TBS yang diproses oleh Perusahaan di tahun 2021, sekitar 80% berasal dari pasokan internal (inti dan plasma), sedangkan sekitar hampir 20% berasal pihak ketiga. Pihak ketiga ini termasuk di dalamnya adalah petani-petani mandiri, koperasi dan perusahaan perkebunan yang berdekatan (Non PKS). Di tahun 2021, Perusahaan berhasil untuk melacak seluruh pasokan yang dipasok ke PKS sebesar 100%.

7. Peningkatan Usaha secara Berkelanjutan.

Perusahaan berkomitmen memberikan mutu dan layanan terbaik kepada pelanggan, di antaranya mengirimkan produk disertai informasi mengenai spesifikasi dan penjelasan lain. Selain itu, Perusahaan juga menjamin bahwa seluruh (100%) proses produksi telah melewati tahap evaluasi dan juga siklus yang memperhatikan keamanan dan kesehatan pelanggan, yang dikuatkan melalui sertifikasi produk dari pihak pihak independen dan juga internal audit.

E. *Sustainable Supply Chain Management* pada PT Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA)

1. **Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

Laporan Keberlanjutan Perseroan disusun sebagai wujud komitmen dan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan perundang-undangan antara lain, Pasal 66 C, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), yang mewajibkan penyampaian laporan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

2. **Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik**

Perseroan memiliki komitmen *land clearing with zero burning* yang tertuang pada Kebijakan Berkelanjutan Perseroan yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perseroan tanggal 9 Januari 2020. Perseroan tidak melakukan pembukaan lahan dengan pembakaran (*zero burning*) dan tidak melakukan penanaman di area kawasan hutan dan area gambut.

3. **Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Keanekaragaman Hayati**

Pada periode pelaporan tercatat sebanyak 481.271 pohon yang telah ditanam. Jenis pohon yang ditanam Perseroan antara lain yaitu pohon albiso, jati mahoni, akasia, dan lain-lain. Program penanaman pohon ini menghasilkan emisi negatif yang dapat diperuntukkan untuk pengurangan emisi Perseroan tahun 2021.

4. **Tanggung Jawab Ketenagakerjaan**

Perseroan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan operasional dengan standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab sosial Perseroan dalam melindungi seluruh karyawan Perseroan dan menyediakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif.

5. **Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pada aspek sosial, Perseroan juga mendorong masyarakat dalam pengembangan berkelanjutan melalui Program Pelatihan Program Magang dan *On the Job Training (OJT)*. Dalam program ini, Perseroan melakukan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga pendidikan perkebunan. Perseroan secara berkala melakukan program kunjungan ke kampus serta mengakomodasi mahasiswa yang akan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang diperlukan sebagai syarat kelulusan mereka.

6. **Penerapan Transparansi**

Guna mendukung komunitas lokal dan perekonomian negara, seluruh rekanan yang terdaftar sebagai pemasok Perseroan sepenuhnya (100%) adalah pemasok lokal atau berasal dari Indonesia.

7. **Peningkatan Usaha secara Berkelanjutan.**

Perseroan memiliki komitmen untuk konsisten menghasilkan produk yang berkualitas dan terjaga keamanannya dalam pemenuhan aspek kesehatan dan keamanan bagi pelanggan. Upaya Perseroan dalam menjamin keamanan dan kualitas produk diwujudkan melalui penerapan Kebijakan Berkelanjutan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kegiatan produksi hingga distribusi.

F. Sustainable Supply Chain Management pada PT PP London Sumatera Indonesia Tbk (LSIP)

1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Laporan Keberlanjutan PT PP London Sumatera Indonesia Tbk memenuhi persyaratan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017. LONSUM telah meminta jaminan pihak ketiga atas laporan ini.

2. Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik

Sertifikasi ISPO untuk operasi kelapa sawit Perseroan dan Program Penilaian Kinerja Lingkungan (PROPER) Pemerintah Indonesia membantu Perseroan mewujudkan komitmen Perseroan terhadap tata kelola yang baik, tidak ada deforestasi, tidak ada penanaman baru di lahan gambut tanpa memandang kedalaman, tidak ada pembakaran, petani kecil, memastikan hak atas tanah, serta hak asasi manusia.

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Keanekaragaman Hayati

Perseroan sudah bisa mengidentifikasi spesies yang dilindungi di konsesi Perseroan dan area sekitarnya melalui penilaian KBKT Perseroan. Untuk melindungi keanekaragaman hayati di hutan tropis Indonesia, Perseroan menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap kegiatan perburuan, perusakan, penebangan hutan, atau pembakaran spesies dan margasatwa liar yang dilindungi.

4. Tanggung Jawab Ketenagakerjaan

Perseroan menyadari tanggung jawab Perseroan untuk menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Seluruh unit operasi LONSUM, pekerja, dan ruang kerja berada di dalam naungan manajemen K3 Perseroan. Selain memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan dalam ISPO, ISO 14001, dan Sertifikasi Halal, seluruh lokasi Perseroan di Indonesia beroperasi menurut SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja), Sistem Manajemen K3 Nasional di Indonesia.

5. Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Perseroan berupaya memberdayakan masyarakat lokal dan meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi. Di bawah program penghidupan kerja dan perkebunan Perseroan, Perseroan mendukung masyarakat dan pemerintah setempat dalam pengembangan ekonomi, dan juga menyediakan akses untuk kesehatan dan pendidikan.

6. Penerapan Transparansi

Sertifikasi ISPO merupakan komponen integral dalam mewujudkan Kebijakan dan komitmen Perusahaan. Sebagai bagian dari komitmen Perusahaan terhadap pengadaan yang bertanggung jawab, Perusahaan menargetkan 100% pabrik dan perkebunan Perusahaan tersertifikasi ISPO pada tahun 2023. Petani kecil menyumbang lebih dari 40% dari semua kelapa sawit yang dibudidayakan di Indonesia.³

7. Peningkatan Usaha secara Berkelanjutan.

Tim peneliti agronomi Perseroan secara terus menerus melakukan eksperimen dan mengimplementasikan berbagai teknik penyempurnaan, seperti penanaman sub-soil dan pembajakan untuk mencegah penyakit Ganoderma.

G. *Sustainable Supply Chain Management* pada PT Mahkota Group Tbk (MGRO)

1. **Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

Perseroan telah memenuhi POJK No. 34/2014 dengan telah dilaksanakannya pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 26 Agustus 2016. Perseroan telah menunjuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Surat Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. SK-III/2018/RPD/MG/H002 tanggal 9 Maret 2018 dan No. SK-X/2018/RPD/MG/H003 tanggal 1 Oktober 2018.

2. **Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik**

Perseroan terus meneguhkan komitmennya untuk menjalankan praktik tata kelola perusahaan terbuka (*Good Corporate Governance/GCG*) secara berkelanjutan guna meraih tujuan. Pelaksanaan praktik GCG senantiasa mengacu pada kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

3. **Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Keanekaragaman Hayati**

Perseroan telah melakukan penanaman 3.016 pohon di sekitar lokasi wilayah operasi dengan tanaman endemik dan pohon buah. Perseroan juga melakukan rehabilitasi hutan mangrove di pesisir sungai dan pantai di Dumai dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

4. **Tanggung Jawab Ketenagakerjaan**

Perseroan memberikan remunerasi yang kompetitif dengan mengacu pada tingkat rata-rata pengupahan pada industri sejenis, peraturan ketenagakerjaan, serta kondisi perusahaan. Perseroan dapat memastikan bahwa sistem remunerasi yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tingkat Upah Minimum Provinsi (UMP) yang ditentukan pemerintah daerah setempat.

5. **Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Perseroan memiliki komitmen untuk berkontribusi aktif membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama para pemangku kepentingan yang diwujudkan dengan realisasi tanggung jawab sosial dan lingkungan secara terpadu dalam seluruh kegiatan usaha.

6. **Penerapan Transparansi**

Komitmen Perseroan pada rantai pasok bahan baku (TBS) yang memiliki ketelusuran dalam mematuhi perundangundangan dan peraturan yang ditetapkan pemerintah menuntut Perseroan untuk menjalin kerja sama dengan para pemasok guna menjamin bahwa mereka beroperasi selaras dengan kebijakan Perseroan. Perseroan berupaya memenuhi persyaratan keberlanjutan dari para konsumen dan pemangku kepentingan lainnya.

7. **Peningkatan Usaha secara Berkelanjutan.**

Perseroan mulai melakukan inovasi untuk penerapan composting dalam melakukan pengelolaan limbah kelapa sawit. Proses pembuatan composting dimulai dengan mengolah janjangan kosong menjadi *fibre bench press*.

H. Sustainable Supply Chain Management pada PT Palma Serasih Tbk (PSGO)

1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Salah satu bentuk inisiatif Perseroan dalam penerapan prinsip keberlanjutan adalah dengan melaksanakan program sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Perseroan menargetkan seluruh kebun dan fasilitas pengolahan kelapa sawit yang sudah memenuhi persyaratan legalitas, akan memperoleh sertifikat ISPO pada tahun 2025 mendatang. Inisiatif ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden No. 44 tahun 2020, yang mewajibkan sertifikasi ISPO bagi perusahaan yang bergerak di sektor industri kelapa sawit.

2. Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik

Perseroan merespon tantangan yang dihadapi industri kelapa sawit melalui pendekatan operasi secara berkelanjutan. Perseroan berfokus pada penerapan praktik perkebunan yang baik (*good agricultural practices/GAP*) dan berinovasi pada upaya-upaya peningkatan produktivitas.

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Keanekaragaman Hayati

Perseroan menetapkan kebijakan yang tegas untuk mencegah terjadinya deforestasi. Pernyataan "*no deforestation*" tercantum secara eksplisit pada kebijakan NDPE Perseroan. Perseroan juga telah menyusun dan mensosialisasikan prosedur tentang persiapan lahan tanpa pembakaran (*zero burning*) untuk melindungi lahan dan mencegah terjadinya kebakaran.

4. Tanggung Jawab Ketenagakerjaan

Sebagai bentuk kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan, Perseroan telah menerapkan pemberian upah minimum sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP)/Kabupaten (UMK) dalam menjalankan kebijakan remunerasi dan kompensasi pekerja. Peraturan tersebut diakomodir di dalam Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.

5. Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Perseroan selalu melibatkan masyarakat sejak sebelum dimulainya kegiatan pembangunan kebun serta kegiatan operasional. Perseroan juga memberdayakan masyarakat lokal setempat untuk terlibat dalam kegiatan operasional Perseroan sebagai kontraktor dan pemasok. Perseroan memberikan prioritas kesempatan kerja kepada masyarakat setempat sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

6. Penerapan Transparansi

Perseroan berupaya untuk menciptakan nilai dengan tidak hanya mengidentifikasi dan mengelola risiko keberlanjutan di internal dan rantai pasokan, tetapi juga melalui kemitraan strategis yang dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

7. Peningkatan Usaha secara Berkelanjutan.

Perseroan tetap fokus dan konsisten pada penerapan praktik perkebunan yang baik (*good agricultural practices/GAP*) dan berinovasi pada upaya-upaya peningkatan produktivitas. Upaya ini memungkinkan Perseroan mampu melindungi lingkungan hidup sekaligus meningkatkan kinerja ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan Perseroan.

I. Sustainable Supply Chain Management pada PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS)

1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Perseroan membentuk penanggung jawab penerapan keberlanjutan di lingkup Perseroan yang berada di bawah Divisi Sustainability. Hal ini sejalan dengan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan, SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, sekaligus menjawab kerangka GRI dan TFCDD.

2. Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik

Perseroan berkomitmen untuk membuat tata kelola yang baik sebagai bagian dari budaya Perseroan dan terus memperkuat praktik-praktik tata kelola guna mengimbangi dinamika dunia usaha, agar Perseroan tetap dapat bertanggung jawab, transparan, dan berlaku adil terhadap seluruh pemangku kepentingan.

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Keanekaragaman Hayati

Perseroan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga keanekaragaman hayati di kawasan HGU perusahaan. Langkah konkret yang dilakukan Perusahaan adalah menyediakan area konservasi lingkungan sebesar 7,21%.

4. Tanggung Jawab Ketenagakerjaan

Perusahaan memberikan fasilitas kesehatan berupa asuransi maupun fasilitas Kesehatan di area operasionalnya. Fasilitas Kesehatan ini dapat diakses oleh seluruh pegawai Perseroan, baik pegawai permanen (*staff*) maupun pegawai kontrak (*non-staff*).

5. Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Perseroan berupaya untuk menggerakkan perekonomian baik perekonomian lokal maupun nasional dengan melibatkan berbagai pihak, terutama komunitas lokal. Dengan demikian, Perseroan berharap dapat membantu pemerintah dalam mendorong pemerataan perekonomian rakyat.

6. Penerapan Transparansi

Perseroan berfokus pada pemenuhan sertifikasi yang menjadi dasar atau landasan perusahaan beroperasi. Sedapat mungkin, perusahaan-perusahaan yang berada di dalam unit bisnis Perseroan sudah tersertifikasi untuk *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)* dan *The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)*. Perseroan optimis untuk menargetkan seluruh anak usaha telah memiliki sertifikat ISPO dan RSPO. Perseroan juga memastikan ketelusuran TBS (*Traceability*) yang diproduksi dapat dipertanggungjawabkan serta memastikan konsumen aman untuk membeli produk perseroan.

7. Peningkatan Usaha secara Berkelanjutan.

Keberlangsungan bisnis perseroan tidak lepas dari peran Sumber Daya manusianya. Keberadaan karyawan sebagai SDM Perseroan sangat penting karena mampu menjaga stabilitas pekerjaan hingga meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, Perseroan memiliki kewajiban untuk mengelola karyawannya secara baik dan komprehensif.

J. Sustainable Supply Chain Management pada PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI)

1. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Pemerintah telah melarang praktik pembukaan lahan baru (*land clearing*) hingga ditetapkan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal ekosistem tanah organik untuk tanaman tertentu.

2. Penerapan Praktik Perkebunan yang Baik

Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) merupakan fondasi strategis bagi pencapaian keunggulan daya saing berkelanjutan. GCG merupakan sistem, struktur, mekanisme, dan budaya yang akan melindungi kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*.

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Keanekaragaman Hayati

NKT dan SKT yang dilakukan Perseroan berhasil mengidentifikasi setidaknya terdapat 18 (delapan belas) jenis fauna dan 11 (sebelas) jenis flora yang masuk ke dalam status kelangkaan berdasarkan Daftar Merah *The International Union for Conservation of Nature (IUCN)* yang tersebar di daerah konsesi TAPG. Fauna dan flora langka tersebut masuk dalam kategori status kelangkaan *Critically Endangered (CR)*, *Endangered (EN)*, dan *Vulnerable (VU)*. Sebagai tindak lanjut, Perseroan menginisiasi sejumlah program untuk melindungi keberadaan spesies-spesies tersebut agar tetap lestari di Areal NKT yang dikelola Perseroan. Setidaknya terdapat 15 jenis mamalia, 31 jenis Avifauna dan 11 jenis flora yang masuk kedalam status kelangkaan berdasarkan *IUCN redlist*.

4. Tanggung Jawab Ketenagakerjaan

TAPG berkomitmen untuk memperhatikan dan melaksanakan seluruh aspek yang berkaitan dengan K3. Sebagai Perseroan yang memiliki ribuan pekerja, TAPG bertanggung jawab penuh untuk melindungi karyawan dan menyediakan lingkungan kerja yang kondusif, aman dan nyaman.

5. Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

TAPG melakukan pembinaan bagi desa-desa yang berada di sekitar wilayah konsensi melalui program DMPA yang diinisiasi sejak tahun 2018. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi yang ramah lingkungan sekaligus sebagai upaya mencegah terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

6. Penerapan Transparansi

Dalam rangka mewujudkan produk sawit lestari, TAPG memastikan pencapaian ketertelusuran penuh untuk seluruh pasokan TBS yang diolah dalam PKS yang dimiliki Perseroan. Pasokan TBS dari kebun inti dan plasma sangat jelas dan *traceable*; namun, untuk pasokan dari petani mandiri, Perseroan mengembangkan program dengan pendekatan yang sama. Sementara untuk TBS yang diperoleh dari pihak ketiga, ketertelusuran menjadi persyaratan untuk dapat memasok TBS.

7. Peningkatan Usaha secara Berkelanjutan.

Prinsip-prinsip Bisnis Berkelanjutan (*Sustainable Business*) dijalankan oleh manajemen keberlanjutan TAPG mulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja keberlanjutan sampai pada pelaporan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam laporan keberlanjutan. Sesuai kebutuhan, manajemen keberlanjutan (*sustainable management*) memfokuskan perhatian pada pengelolaan ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.

SIMPULAN

Proses *supply chain management* industri perkebunan kelapa sawit dimulai dengan pemilihan bibit yang baik dan penanaman kelapa sawit yang optimal di lahan-lahan yang sesuai dengan standar penanaman kelapa sawit. Ketika buah kelapa sawit telah mencapai usia produktif, buah kelapa sawit akan dipanen dan diangkut ke pabrik pengolahan. Waktu yang dibutuhkan pohon kelapa sawit untuk dapat menghasilkan buah kelapa sawit yang siap untuk panen yaitu sekitar empat tahun. Setiap pohon akan terus menghasilkan buah dalam jangka waktu 30 tahun dan pohon akan tumbuh sekitar 12 meter. Buah kelapa sawit akan diproses di dalam pabrik dan akan menghasilkan produk berupa minyak kelapa sawit serta produk turunannya. Setiap buah kelapa sawit yang telah dipanen akan mengandung 20-30% minyak. Pada tahapan ini, *supply chain management* melibatkan pengawasan mutu produk dan pengelolaan limbah produksi. Setelah selesai diolah, produk minyak kelapa sawit atau produk turunannya akan dikemas dan didistribusikan ke pasar dan industri di seluruh dunia. Tahapan ini akan melibatkan pengelolaan gudang, pengiriman, dan pengawasan kualitas produk. Produk minyak kelapa sawit digunakan di berbagai industri seperti makanan, kosmetik, dan energi. *Supply chain management* juga melibatkan pengawasan penggunaan produk yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan dalam rantai pasok kelapa sawit di Indonesia. Dengan menganalisis implementasi *Sustainable Supply Chain Management (SSCM)* berdasarkan prinsip sertifikasi ISPO, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik-praktik yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa produksi kelapa sawit berkelanjutan dan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perusahaan kelapa sawit di Indonesia tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan implementasi prinsip-prinsip ISPO dalam operasi mereka. Dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SSCM berdasarkan prinsip ISPO, penelitian ini dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih untuk mencapai keberlanjutan yang lebih baik dalam industri kelapa sawit. Penelitian ini dapat mendorong perbaikan praktik industri secara keseluruhan. Dengan mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasi SSCM berdasarkan prinsip ISPO, penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemangku kepentingan, termasuk perusahaan kelapa sawit, pemerintah, dan organisasi terkait, untuk mengembangkan kebijakan dan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan dalam industri kelapa sawit.

Penelitian ini mungkin hanya melibatkan sejumlah perusahaan kelapa sawit yang terbatas sebagai sampel penelitian. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mungkin tidak dapat secara langsung diterapkan pada seluruh industri kelapa sawit di Indonesia. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini mungkin hanya mewakili situasi khusus dari perusahaan-perusahaan yang menjadi subjek penelitian. Ketersediaan dan keandalan data menjadi tantangan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari perusahaan kelapa sawit mungkin terbatas atau tidak sepenuhnya akurat. Hal ini dapat mempengaruhi validitas dan kepercayaan hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan berdasarkan laporan keberlanjutan masing-masing perusahaan di tahun 2021 saja, sehingga hasilnya mungkin tidak mencerminkan perubahan yang terjadi setelah tahun tersebut. Praktik dan kebijakan dalam industri kelapa sawit dapat berkembang seiring waktu, sehingga penelitian ini mungkin tidak merepresentasikan situasi terkini. Penelitian ini dilakukan dalam konteks industri kelapa sawit di Indonesia. Oleh karena itu, hasilnya mungkin tidak dapat diterapkan secara langsung pada industri kelapa sawit di negara lain atau pada sektor lain yang berbeda. Konteks geografis, sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda dapat memiliki pengaruh yang signifikan pada implementasi SSCM dan prinsip sertifikasi ISPO. Penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan peran dan interaksi antara individu-individu yang terlibat dalam rantai pasok kelapa sawit. Faktor manusia, seperti sikap, pengetahuan, dan keahlian karyawan serta manajemen, juga dapat mempengaruhi implementasi SSCM dan keberhasilan sertifikasi ISPO. Penelitian yang lebih mendalam tentang faktor manusia ini mungkin diperlukan untuk pemahaman yang lebih lengkap.

Melalui penelitian ini, peneliti di masa yang akan datang dapat melakukan penelitian longitudinal untuk memahami perubahan dan perkembangan implementasi SSCM berdasarkan prinsip sertifikasi ISPO dalam industri kelapa sawit di Indonesia dari tahun ke tahun. Ini akan memberikan wawasan tentang tren jangka panjang, tantangan yang dihadapi, dan dampak dari upaya berkelanjutan dalam industri tersebut. Selain itu peneliti berikutnya dapat melakukan perbandingan antara industri kelapa sawit dengan sektor lainnya dalam hal implementasi SSCM dan dampaknya terhadap keberlanjutan. Studi tersebut dapat mengungkapkan persamaan dan perbedaan dalam praktik pengelolaan rantai pasok yang berkelanjutan di berbagai sektor, memberikan wawasan yang lebih luas tentang praktik terbaik. Peneliti berikutnya juga dapat menggali lebih dalam faktor sosial dan kondisi kerja di perusahaan kelapa sawit yang memengaruhi implementasi SSCM dan prinsip sertifikasi ISPO. Studi ini dapat melibatkan analisis lebih lanjut tentang keterlibatan komunitas lokal, hak pekerja, kesetaraan gender, dan dampak sosial lainnya yang terkait dengan industri kelapa sawit. Peneliti berikutnya dapat melakukan evaluasi efektivitas kebijakan yang berupa penelitian secara mendalam terhadap kebijakan yang mendukung implementasi SSCM dan prinsip sertifikasi ISPO di Indonesia. Studi semacam itu dapat mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang ada, mengidentifikasi celah atau kelemahan, dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kebijakan yang lebih efektif. Peneliti di masa yang akan datang akan dimungkinkan untuk melakukan studi perbandingan antara implementasi SSCM dan prinsip sertifikasi ISPO dalam industri kelapa sawit di Indonesia dengan negara-negara produsen kelapa sawit lainnya. Ini akan memungkinkan pemahaman

yang lebih baik tentang keberhasilan dan tantangan yang terkait dengan praktik berkelanjutan dalam industri kelapa sawit di skala global.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. N. (2013). *Manajemen Rantai Pasokan (Supply Chain Management): Konsep dan Hakikat*. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fti2/article/view/1315>
- Budiharjo, E., Sujarto, D. (2009). *Kota Berkelanjutan*. Bandung: PT Alumni
- Carmela, M., Bue, L., & Klasen, S. 2013. *Identifying Synergies and Complementarities Between MDGs: Results from Cluster Analysis*. 647–670. <https://doi.org/10.1007/s11205-013-0294-y>
- Castañeda, G., Chávez-Juárez, F., & Guerrero, O. A. 2018. *How Do Governments Determine Policy Priorities? Studying Development Strategies Through Spillover Networks*. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 154, 335–361. <https://doi.org/10.1016/J.JEBO.2018.07.017>
- Davies, R. 2015. *The Sustainable Development Goals As A Network Of Targets. Monitoring and Evaluation NEWS*. Department of Economic and Social Affairs, 1(141), 1–17. Retrieved from http://www.un.org/esa/desa/papers/2015/wp141_2015.pdf
- Dewi, R. U. I., Zuhaiery, A., Sa'diyah, N. H., Rizqiya, T. F., & Nurpratiwi, H. (2023). *Harmonisasi Masyarakat dan Pemerintah untuk Mengatasi Deforestasi di Selatan Tulungagung*. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 2(2), 149-157. <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Dewantara/article/view/1029/899>
- Directorate of Technical Education*. (2017). *Perubahan Iklim, “Pencegahan Deforestasi” dan Indonesia*. <https://www.downtoearth-indonesia.org/id/story/perubahan-iklim-pencegahan-deforestasi-dan-indonesia>
- Egorov, D., Levina, A., Kalyazina, S., Schuur, P., & Gerrits, B. (2020, May). *The Challenges of The Logistics Industry In The Era of Digital Transformation. In International Conference on Technological Transformation: A New Role for Human, Machines And Management* (pp. 201-209). Cham: Springer International Publishing. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-64430-7_17
- Forest Watch Indonesia. (2020). *Menelisik Angka Deforestasi Pemerintah*. <https://fwi.or.id/menelisik-angka-deforestasi-pemerintah/>
- Guha, J., & Chakrabarti, B. (2019). *Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) Through Decentralisation and The Role Of Local Governments: A*

- Systematic Review. Commonwealth Journal of Local Governance*, (22), 1-21.
<https://search.informit.org/doi/epdf/10.3316/informit.896493850496702>
- Gunasekaran, A., Subramanian, N., & Rahman, S. (2015). *Green supply chain collaboration and incentives: Current trends and future directions. Transportation research part E: logistics and Transportation Review*, 74, 1-10.
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1366554515000034>
- Jebarus, Felix. 2001. *Supply Chain Management*, Usahawan No: 02 Th XXX Februari.
- Klarin, T. (2018). *Assumptions For a Successful Implementation of The Concept Of Sustainable Tourism Development: Example Of Urban Destinations Of The Republic Of Croatia. Acta Turistica*, 30(1), 43-85.
<https://doi.org/10.22598/at/2018.30.1.43>
- Le Blanc, D. 2015. *Towards Integration at Last? The Sustainable Development Goals as a Network of Targets. Sustainable Development*, 23(3), 176–187.
<https://doi.org/10.1002/sd.1582>
- Liu, W., Bai, E., Liu, L., & Wei, W. (2017). *A Framework of Sustainable Service Supply Chain Management: A Literature Review and Research Agenda. Sustainability*, 9(3), 421. <https://www.mdpi.com/2071-1050/9/3/421>
- Nilsson, M. 2016. *Understanding And Mapping Important Interactions Among Sdgs: Readyng Institutions And Policies For Integrated Approaches To Implementation Of The 2030 Agenda. In Expert meeting in preparation for HLPF 2017* (pp. 1–33).
<https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/12067>
[Understanding and mapping important interactions among SDGs.pdf](https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/12067)
- Nilsson, M., Griggs, D., & Visback, M. 2016. *Map the Interactions between Sustainable Development Goals. Nature*, 534(15), 320–322.
<https://doi.org/10.1038/534320a>
- Novalia, T. (2017). *Neraca Lahan Indonesia: Penyusunan Neraca Lahan Indonesia untuk Mendukung Implementasi Sustainable Development Goals*, 245–254.
<file:///D:/Downloads/68-Article%20Text-1011-1-10-20200513.pdf>
- Pradhan, P., Costa, L., Rybski, D., Lucht, W., & Kropp, J. P. 2017. *A Systematic Study of Sustainable Development Goal (SDGs) Interactions Earth's Future. Earth's Future*, 1169–1179. <https://doi.org/10.1002/eft2.266>
- Rimbakita. (2020). *Deforestasi – Pengertian, Penyebab, Akibat & Cara Mencegah Penebangan Hutan*. <https://rimbakita.com/deforestasi/>
- Schroeder, A., & Hope, B. G. (2007). *Information Flows in A New Zealand Sheep Meat Supply Chain. In Supply Chain Management: Issues in The New Era Of*

- Collaboration And Competition* (pp. 45-63). IGI Global. <https://www.igi-global.com/chapter/supply-chain-management/29998>
- Septiyan, A. R. (2019). Deforestasi: Pengertian, Penyebab, Dampak, dan Pencegahan. <https://foresteract.com/deforestasi/>
- Seuring, S. and Müller, M. (2008) *From a Literature Review to a Conceptual Framework for Sustainable Supply Chain Management*. *Journal of Cleaner Production*, 16, 1699-1710. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.04.020>
- Shafitri, L. D., Prasetyo, Y., & Haniah, H. (2018). Analisis Deforestasi Hutan di Provinsi Riau dengan Metode Polarimetrik dalam Pengindraan Jauh. *Jurnal Geodesi Undip*, 7(1), 212-222. <https://doi.org/10.14710/jgundip.2017.19330>
- Silva, G. M., Gomes, P. J., & Sarkis, J. (2019). *The Role Of Innovation In The Implementation of Green Supply Chain Management Practices*. *Business Strategy And The Environment*, 28(5), 819-832. <https://doi.org/10.1002/bse.2283>
- Syah, R. F. (2017). Analisa kebijakan sektor lingkungan: Permasalahan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan di Indonesia. *Journal of Governance*, 2 (1)(1), 1–17. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jog/article/view/2117/1647>
- Tyagi, P., & Agarwal, G. (2014). Supply chain integration and logistics management among BRICS: a literature review. *American Journal of Engineering Research (AJER)* e-ISSN, 2320-0847. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/85272392/ZI35284290-libre.pdf?1651404274=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DSupply_Chain_Integration_and_Logistics_M.pdf&Expires=1690032326&Signature=G9ktZ824DqPCsZ9v729V4OH CWsBRlaQWyLu72IrfgftcvWD2mytsW-Nzi7W0MIwtkqC5Ovz8wi9~0EHu98CVZlg4xkNk1YnbB1z~jiC~tJi3yjKBu kfMcV6HOenAVeRnWM407-D9YvsqtbqFUcNo9InO6k9e4OwTYRE5JxxkFox7LGo6LvHOvwhhAhgk1N~SEzioH2~mknzqMwFdSKFBQE7PjAwoDxUfVdj3jyVpk~tb75d~X1S7y3213s0Md4-XP0l0Gbsw6m6QArpUHAAj3~ALYQXBRflnUQnsq1lwAmVy6b80Rcg5~bq19zS~VY6RMzYGCUKTuSDyeABwcyIfQ__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- Wahyuni, H., Suranto. (2021). *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*. Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/10083>

- Widodo, P., & Sidik, A. J. (2020). Perubahan tutupan lahan hutan lindung gunung guntur tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. *Wanamukti: Jurnal Penelitian Kehutanan*, 21(1), 30-48. <http://dx.doi.org/10.35138/wanamukti.v21i1.153>
- Wisner, J. D., Tan, K. C., & Leong, G. K. (2014). *Principles of supply chain management: A balanced approach*. Cengage Learning. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=yTN-BAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Wisner,+Tan,+Leong%3B+2009&ots=ZaH7_Z54S5&sig=jwXtSEI5q2iO7JRfxDpdVhT6QpQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Wisner%2C%20Tan%2C%20Leong%3B%202009&f=false
- Yakin, A. (2015). Prospek dan Tantangan Implementasi Pasar Karbon bagi Pengurangan Emisi Deforestasi dan Degradasi Hutan di Kawasan ASEAN. In Paper disampaikan pada Seminar Nasional “Optimalisasi Integrasi Menuju Komunitas ASEAN. https://www.researchgate.net/publication/319804233_PROSPEK_DAN_TANTANGAN_IMPLEMENTASI_PASAR_KARBON_BAGI_PENGURANGAN_EMISI_DEFORESTASI_DAN_DEGRADASI_HUTAN_DI_KAWASAN_ASEAN
- Yakin, A. (2017). Prospek dan Tantangan Implementasi Pasar Karbon , (September).